

BAB II

Kajian Pustaka

2.1 Penelitian Terdahulu

Dalam membuat rancangan penelitian perlu adanya kajian-kajian pustaka yang bisa menjadi landasan untuk membuat sebuah karya ilmiah yang bisa dibahas secara teoritis sehingga bisa dipertanggung jawabkan. Peneliti mengambil judul tesis mengenai “Peran Modal Sosial *Parabela* dalam Mendukung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Pasca Orde Baru”. Untuk itu kajian pustaka yang berkaitan dengan judul tesis tersebut penulis mengelompokkan menjadi tiga kajian yaitu tentang modal politik, elite lokal, dan peran adat lokal.

Kajian pertama mengenai modal politik dilakukan oleh Abbas (2012), Rusnaedy & Purwaningsih (2018), Baharuddin & Purwaningsih (2017).

Baharuddin & Purwaningsih (2017), Kemenangan Indah Putri Indriani memiliki modal lebih dalam Pemilukada di Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015 yaitu modal sosial, modal budaya, modal politik dan modal ekonomi. Modal politik yang dimilikinya diantaranya adalah dukungan dari mantan Bupati Luthfi A. Mutty dan juga memiliki pasangan yang merupakan mantan birokrat dan anggota DPRD yang memiliki pengalaman dalam beberapa pemilukada sebelumnya.

Rusnaedy & Purwaningsih (2018), kemenangan pasangan calon bisa didapatkan melalui pelimpahan kekuatan modal yang sudah dimiliki oleh elite yang berkuasa sebelumnya sebagaimana halnya pemilihan Adnan sebagai orang yang mendapatkan dukungan dari Ichsan Yasin Limpo. Dimana Ichsan Yasin Limpo adalah kepala daerah sebelumnya yang sudah memiliki basis sumber daya yang

mengantarkanya pada kemenangan pilkada sebelumnya. Modal yang dimaksud adalah basis masa, warisan birokrasi dan program yang sebelumnya memberikan dampak besar pada masyarakat. Hal inilah yang menjadikan peluang Adnan untuk memenangkan kontestasi pilkada semakin besar.

Abbas (2012), pertarungan politik di Maluku Utara menjadi contoh bagaimana pertarungan antara kekuatan elite lokal dan elite nasional dimana Thaib Armayin dan Abdul Gafur. Kemenangan Thaib Armayin pada pemilukada 2001-2002 dan juga 2007-2008 menjadikan bagaimana kekuatan yang di miliki oleh Thaib Armayin meskipun hanya seseorang elite lokal mampu mengalahkan Abdul Gafur yang pada masa Bupati Soeharto menjadi menteri, kurangnya kontribusi Abdul Gafur pada daerah saat menjadi menteri menjadi salah satu penyebab kekalahannya. Maka Thaib Almayin yang pernah menjabat sebagai birokrat daerah asalnya dan memiliki kontribusi yang sangat besar pada daerah menjelma menjadi elite lokal yang memiliki pengaruh besar kepada masyarakat Maluku Utara.

Kajian kedua mengenai Elite Politik Lokal dilakukan oleh Zainal & Kaldum (2015), Idrus & Purwaningsih (2016), Karomani (2009), Ainillah (2017), Kosim (2007), Muslim dkk. (2015), Malik (2014), Nardeyoga (2015), Zamori (2007), Raditya (2011), Abbas (2012).

Zainal & Kaldum (2015), pengaruh *local strongmen* mengantarkan Aras Tammauni dan Muh. Amin Jasa pada kemenangan pilkada Mamuju Tengah. Eksistensi Aras Tammauni sebagai *local strongmen* ditandai dengan berhasilnya Aras Tammauni membentuk jaringan berupa jaringan keluarga, jaringan dengan masyarakat, dan kepemilikan modal (modal ekonomi, modal simbolik, dan modal

sosial). Dengan melekatnya ketiga indikator tersebut maka semakin tepat bahwa Aras Tammauni adalah *local strongmen* yang berpengaruh besar terhadap kemenangannya dan wakilnya Muh. Amin Jasa dalam Pemilukada Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2015.

Idrus & Purwaningsih (2016), peran elit lokal di lihat dari pendekatan posisional, pendekatan reputasi dan pendekatan keputusan yang berasal dari teori elit politik dapat menjawab rumusan masalah yang ada di penelitian ini. Pendekatan posisional inilah merupakan bentuk kesuksesan Partai Gerindra dalam mendapatkan perolehan suara yang maksimal, memanfaatkan posisi elit lokal di partai maupun di daerah pemilihan masing-masing calon, terbukti dengan terpilihnya calon anggota dewan di setiap dapil Luwu Utara.

Karamoni (2009), dalam perjalanan elite ulama dan birokrat memegang peran penting dan dominan dalam struktur stratifikasi masyarakat Banten dibandingkan elite jawara. Namun mulai terjadi pergeseran dimana Ulama bukan lagi menjadi elite dominan melainkan jawara yang menggeser dominasi tersebut. Jawara memperoleh akses yang sangat besar di lingkungan pemerintahan yang amat menguntungkan posisi politik dan ekonominya dibandingkan dengan elit ulama.

Kosim (2007), masyarakat Madura yang menjadi elite utama adalah Kyai. Pengaruh Kyai melampaui batas pengaruh institusi-institusi kepemimpinan lainnya. Selain Kyai, terdapat komunitas lain yang menjadi elite dalam kehidupan sosial politik masyarakat Madura adalah Blater. Peran dan fungsi sosial Kyai dan Blater sangat bertolak belakang. Blater identik dengan kekerasan sedangkan kyai identik dengan nilai-nilai keagamaan.

Ainillah (2016), Desa Banjar memiliki sebuah struktur elite politik yang berasal dari Kepala Desa, Blater dan juga Kyai. Peran Elite Blater dalam pemilihan Kepala Desa adalah mencari masa yang di mulai dari wilayah-wilayah kekuasaannya dengan melibatkan blater kampung dusun serta melakukan taktik untuk baik sebelum pilkades ataupun setelahnya. Ketiga blater menggunakan strategi untuk mendapatkan suara rakyat dengan berbagai cara untuk mendapatkan pengakuan dari masyarakat atau dapat dikatakan sebagai peneguhan kultural.

Muslim, Kolopaking, Dharmawan & Soetarto (2015), terdapat dua kekuatan elite yang besar di daerah Pandeglang Banten yaitu Ulama dan Jawara. Dalam kontestasi pilkada peran kedua elite tersebut sangatlah berpengaruh dan juga keterlibatan kedua elite tersebut dalam politik sangatlah besar terutama kekuatan jawara yang sangat mendominasi. Meskipun jawara mendominasi pada penguasaan politik dan mulai menyingkirkan peran ulama akan tetapi ulama masih menguasai dalam aspek sosial dimasyarakat sehingga terjadilah patron klien antara jawara dan Ulama.

Malik (2016), komunikasi politik yang dilakukan oleh masyarakat masyarakat adat dengan kekuatan politik dalam Pilkada Lebak 2013 dilatarbelakangi problem eksistensi akibat penguasaan lahan tempat tinggal dan matapencarian oleh pihak pengelola Kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS). Kedua, untuk memperoleh kembali eksistensinya akibat ekspansi kewilayahan oleh pengelola TNGHS mereka menjalin komunikasi politik dalam bentuk lobi dan negosiasi dengan kekuatan politik di Kabupaten Lebak dalam Pilkada 2013 melalui pemberian dukungan kepada Pasangan Iti Oktavia-Ade

Sumardi sebagai calon bupati dan wakil bupati, dengan harapan ketika terpilih dapat memperjuangkan kepentingan adat berupa terbitnya Perda tentang adat. Ketiga, proses-proses komunikasi politik berupa lobi dan negosiasi telah membawa kemenangan pasangan Iti-Ade dalam Pilkada 2013 dan berimplikasi pada terbitnya Peraturan Daerah (Perda) tentang masyarakat adat.

Nardeyoga (2015), dalam kontestasi pemilihan legislatif 2014 di Nganjuk kekuatan masa yang militan dan jaringan yang kuat dari Persaudaraan Setia Hati Ternate yang berada di Nganjuk berhasil memenangkan pemilihan legislatif. Dengan memonopoli dukungan sehingga bisa memenangkan orang-orangnya dari latar belakang partai yang berbeda dan membentuk kekuatan di badan legislatif yang besar.

Zamori (2007), Juragan dan Kyai sama-sama memiliki jaringan sosial yang sangat kuat di Madura namun memiliki perbedaan dalam hal jaringan sebagai jalur untuk memperkuat kekuasaan politiknya. Juragan dengan kapital sosialnya sedangkan Kyai dengan kekuatan sosio kultural dan agamanya. Namun mulai maraknya Kyai di Madura yang ikut serta dalam kontestasi politik membuat kharisma sebagai seorang tokoh yang agamis mulai memudar. Kyai yang berpolitik memunculkan anggapan bahwa kyai tersebut tidak akan murni lagi sebagai tokoh yang bisa menetralkan masyarakat namun lebih pada putusan-putusan yang berbau politik. Hal yang sama tidak akan berpengaruh pada juragan yang ikut serta dalam kontes politik.

Raditya (2011), Blater yang memiliki cerita panjang sejak masa penjajahan dimana rakyat Madura yang dipaksa untuk melakukan pekerjaan yang lebih

menguntungkan bagi kolonial sehingga membangkitkan gejolak di masyarakat dan membentuk perkumpulan yang kemudian dinamakan blater dan berperan menjadi pemberi keamanan bagi masyarakat Madura. Bahkan, mereka lebih berkuasa dan mampu mengendalikan rasa aman daripada yang dilakukan oleh aparat keamanan legal seperti kepolisian. Penyelesaian sengketa dalam perebutan suara pilkada misalnya ternyata pihak Blatèr lebih memilih menyelesaikannya dengan cara carok ataupun pembunuhan daripada masing-masing pihak yang bertikai harus pergi melaporkannya kepada pihak kepolisian. Ini bukan berarti mereka kecewa dengan kinerja kepolisian, tetapi cara-cara adu kekuatan dan kekerasan seperti itu menjadi strategi akumulasi kekuasaan diantara para Blatèr. Kekuatan yang dimiliki oleh blater semakin memberikan dampak yang sangat besar dalam hal demokrasi sehingga mampu untuk menginterfensi dalam pemilihan, terutama bagi mereka yang mereka dukung dalam sebuah pemilukada.

Kajian ketiga membahas mengenai peran adat lokal dilakukan oleh Artina (2017), Husain dkk (2012), Sari & Harakan (2017). Husain, Haryadi & Wastutiningsih (2012), menjabarkan tentang peranan dari kepemimpinan yang dimiliki *Parabela* setelah munculnya kebijakan Otonomi Daerah terlihat pada tugasnya sebagai pemberi informasi, sebagai pemangku adat, mediator dan pegambil keputusan dalam masyarakat Hukum Adat. Bahkan meskipun dengan adanya pemerintahan desa yang secara konstitusional *parabela* juga dapat membantu tugas pemerintah desa dimasyarakat. Hal ini dikarenakan dalam masyarakat Buton *parabela* memiliki kedudukan tersendiri dan sebagai sosok sentral dalam kehidupan masyarakat desa.

Sari & Harakan (2017), kekuatan adat mulai diberikan ruang setelah jatuhnya Orde Baru terutama dalam kontestasi pilkada. Adat kemudian menjadi elite yang memiliki kekuatan dan pengaruh sehingga bisa memenangkan pilkada. Akan tetapi bila kekuatan ini tidak didukung dengan modal yang lain maka tetap akan mendapatkan kekalahan ketiak berhadapan dengan orang yang memiliki modal lebih banyak. Akan tetapi elite adat ini menjadi dilupakan setelah pilkada berlangsung, adat kemudian hanya berperan dalam mengatasi konflik yang sedang berlangsung dimasyarakat.

Artina (2017), Tokoh adat memiliki peran untuk memberikan pandangan kepada masyarakat serta membina masyarakat sehingga dapat berperilaku sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku dalam masyarakat. Dalam hal pemekaran sebuah daerah pun dalam masyarakat yang masih memiliki hukum adat perlu adanya pertimbangan dan pandangan dari tokoh-tokoh adat. Karena tokoh adat inilah yang lebih mengetahui dimana saja yang menjadi batas wilayah adat sebuah wilayah sehingga perlu adanya kontribusi tokoh adat dalam menentukan batas wilayah.

Table 1. Ringkasan Penelitian Terdahulu terkait isu modalitas, elite dan adat pada level lokal

Klasifikasi Isu	Penulis	Temuan Penelitian
Modalitas Politik	Abbas (2012), Rusnaedy & Purwaningsih (2018), Baharuddin & Purwanignsih (2017).	Secara Umum adalah Modalitas Polittk menjadi penentu terbesar untuk meraih kemenangan dalam kontestasi politik baik itu pemilukada maupun pemilihan legislative. Modal Politik, Modal Sosial, dan Modal Ekonomi harus dimiliki oleh calon yang akan bertarung dalam pilkada dan

		<p>pileg. Modal sosial menjadi hal yang utama untuk di dapatkan karena setiap aktor politik baik itu yang baru ataupun yang sudah lama di kenal publik membutuhkan jaringan yang sangat luas agar dia semakin dikenal.</p>
Elite Politik Lokal	<p>Zainal & Kaldum (2015), Idrus & Purwaningsih (2016), Karomani (2009), Ainillah (2017), Kosim (2007), Muslim dkk. (2015), Malik (2014), Nardeyoga (2015), Zamori (2007), Raditya (2011), Abbas (2012).</p>	<p>Elite lokal seperti Blater di Madura, Jawara di Banten, Kiyai, Umaroh bahkan Juragan Menjadi sebuah kekuatan besar yang berada di dalam masyarakat bahkan dalam lingkup pemerintahan. Namun mulai terjadi pergeseran dimana Ulama bukan lagi menjadi elite dominan melainkan jawara dan blater yang menggeser dominasi tersebut. Jawara dan blater sebagai elite lokal memperoleh akses yang sangat besar di lingkungan pemerintahan yang amat menguntungkan posisi politik dan ekonominya dibandingkan dengan elit ulama. Namun ini menunjukkan besarnya kekuatan modal sosial yang dimiliki oleh ulama, Blater, Dan Jawara yang memiliki jaringan sampai pada lingkungan masyarakat terkecil seperti dusun sehingga dapat memberikan kekuatan politik bahkan menjadikan anggota mereka masuk dalam lingkungan politik pemerintahan.</p>

Peran adat lokal	Artina (2017), Husain dkk (2012), Harakan (2017).	Elite adat lokal memiliki peran tersendiri dalam masyarakat terutama bagi daerah yang masih menjalankan nilai-nilai adat di daerahnya, tokoh adat berperan sebagai penengah untuk keputusan-keputusan yang ada didalam masyarakat. Hal ini juga menjadikan tokoh adat dimata masyarakat sangat dihormati dan dihargai.
------------------	---	--

Sumber : diolah oleh penulis

Berdasarkan hasil Penelitian terdahulu menggambarkan bahwa modal sosial yang dimiliki oleh elite lokal memiliki kekuatan yang besar berupa jaringan yang langsung menyentuh kepada masyarakat sebagai sasaran dalam pemilihan ataupun menjadi target aktor-aktor politik yang bertarung dalam pemilihan kepala Daerah. Sehingga untuk mendapatkan kekuatan tersebut maka aktor politik hanya perlu untuk melakukan *patron- client* kepada elite elite lokal tersebut.

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus utama adalah bagaimana individu dari seorang *parabela* sebagai seorang tokoh adat dalam masyarakat karena dia sebagai pemimpin di dalam sebuah desa selain kepala desa namun dalam kontes yang berbeda bisa memberikan pengaruh yang luar biasa dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Buton. Kekuatan ketokohan seorang *parabela* hampir seperti ketokohan yang dimiliki oleh kyai hanya saja kyai memiliki pesantren sebagai modal utama pembentuk jaringan komunikasinya sedangkan *parabela* langsung sebagai pemimpin dalam masyarakat adatnya.

2.2 Kerangka Teori

2.2.1 Elite Politik dan Elite Non Politik

Tokoh sosiologi ternama yakni Marx menjadi peletak dasar lahirnya kajian tentang elite. Konsep kelas yang dikemukakannya menjadi awal dimulainya gagasan tentang adanya struktur dan lapisan dalam masyarakat. Pemikiran Marx tentang masyarakat kapitalis telah merangsang lahirnya kajian elite. Marx menyatakan bahwa setelah jatuhnya masyarakat kapitalis, maka yang akan timbul adalah masyarakat tanpa kelas sosial, yakni masyarakat tanpa kelas yang berkuasa dan yang dikuasai (Budiardjo, 1984 : 22).

Pemikiran Marx yang demikian menjadi permulaan munculnya kajian mengenai elite yang dikemukakan oleh beberapa ahli seperti Pareto, Mosca dan Putnam. Pareto melihat elite sebagai fakta sosial yang dibangun oleh perbedaan psikologi antar individu. Menurut Pareto elite merupakan kelompok sosial yang memiliki indeks tertinggi dalam masyarakat sehingga memiliki pengaruh dalam kehidupan sosial-politik masyarakat. Indeks tersebut lebih banyak didasari oleh pertimbangan kekayaan, kecakapan dan kekuasaan politik. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa kekuasaan politik mendominasi dua diantara tiga kategori tersebut (Budiardjo, 1984 :24).

Mosca berpendapat bahwa: “Diantara sekian kecenderungan dan fakta dilapangan yang dapat ditemukan dalam hampir semua organisme politik, adalah sangat jelas hal ini bisa dilihat dengan kasat mata. Bahwa di masyarakat mana saja, baik masyarakat yang masih baru tumbuh hingga yang sudah mampu membangun peradaban yang lebih mapan, yang berkembang menjadi masyarakat yang lebih

maju dan powerful, di dalamnya terdapat dua kelas masyarakat yaitu kelas yang menguasai dan yang dikuasai. Kelas pertama selalu dengan jumlah yang lebih sedikit, memonopoli kekuasaan dan menikmati keuntungan dari kekuasaan yang dijalankannya. Sementara itu, kelas yang kedua jumlahnya jauh lebih besar, secara langsung dikuasai dan dikendalikan oleh kelas yang pertama, yang dalam hal ini sekarang menjadi kurang lebih absah, dan dijalankan dengan cara yang kurang lebih arbitrar dan dengan kekerasan” (Maliki, 2010 : xi).

Bagaimana mengidentifikasi seseorang sebagai elite atau pemilik kuasa? Menurut Putnam, ada tiga cara untuk mengidentifikasi hal tersebut, yakni dengan analisa posisi, reputasi dan keputusan. Posisi formal maupun non formal dianggap dapat membuat seseorang menjadi elite karena bisa memediasi dan memberikan atribut kekuasaan yang kemudian dikelola dengan sedemikian rupa. Sedangkan analisis reputasi lebih bersifat informal. Elite dilihat dari bagaimana dia dianggap berpengaruh di dalam kelompok masyarakat walaupun tidak memiliki jabatan tertentu. Sedangkan pertimbangan keputusan mengedepankan pengaruh seseorang terhadap pembuatan keputusan dalam kelompok masyarakat (Mas'Oed, 2001 : 91-94).

Pada masyarakat moderen, konsep mengenai elite bisa dilihat bagaimana pandangan dari Suzane Keller yang menyebutkan sebagai elite strategis. Dalam masyarakat moderen terdapat individu yang menonjol disbanding dengan yang lainnya kerana memiliki keterampilan di bidang tertentu. Elite strategis ini diantaranya adalah elite politik, militer, pendidikan, agama, filsafat, ekonomi, pengetahuan, kesusastraan dan kesenian. Beragam macam elite inilah yang

menunjukkan bahwa kekuasaan pada masyarakat moderen terdapat pada banyak dimensi. Dan bisa dipandang secara garis besar bahwa mereka memiliki kekuasaan dimasyarakat dengan kelas kelas tertentu (Budiardjo, 1984: 22-23).

Pengertian elite oleh Baswedan (2006) yaitu sekelompok elite di antara kaum elite-elite yang lain yang berkuasa menentukan arah kehidupan bangsa dan negara. Anies mengatakan pembentukan ruling elite ditentukan oleh perekrutan anak-anak muda, tren utama bangsa. Trend utama bangsa ini berubah dari satu masa ke masa berikutnya seiring dengan perjalanan sejarah. Anak-anak muda yang pada masa mudanya terlibat dalam tren utama yang mewarnai bangsa ini kelak akan menjadi aktor-aktor di dalam ruling elite.

Maka konsep elite bisa dimaknai sebagai segelintir orang dalam masyarakat yang memiliki kekuatan ataupun dianggap sebagai orang yang berpengaruh baik dia memiliki jabatan ataupun tidak dan bisa menentukan arah pergerakan dari masyarakat dengan jumlah yang lebih banyak.

Pengklasifikasian elite juga perlu diketahui agar dapat membedakan mana yang disebut dengan elita dan mana yang bukan. Pareto kemudian membagi masyarakat terdiri atas dua kelas yakni: kelas pertama adalah lapisan atas, yaitu terbagi atas elite yang memerintah (*governing elite*) dan elite yang tidak memerintah (*non governing elite*). Kelas kedua adalah lapisan masyarakat yang lebih rendah, yaitu non elite, dalam hal ini adalah massa (Bottomore, 2006 : 2). Antara elite memerintah dan elite yang tidak memerintah, keduanya memiliki wadah tersendiri dalam memainkan perannya sebagai elite serta strategi dalam

memperoleh legitimasi massa. Massa sendiri walaupun cenderung bersifat pasif, namun dalam situasi-situasi tertentu dapat mempengaruhi kedudukan elite.

Indonesia sendiri mengalami beberapa kali perubahan siapa saja yang menjadi elite yang berkuasa. Ruling elite di Indonesia yang dikemukakan oleh Baswedan (2006) terbentuk oleh dua hal yaitu perekrutan dan tren utama bangsa Indonesia. Tren utama bangsa inilah yang selalu mengalami perubahan dari masa kemasa. Tren tersebut juga menjadi dasar untuk pengklasifikasian elite di Indonesia yang diungkapkan oleh Anies, yang dikategorikan dalam empat jenis elite di Indonesia:

- a. Elite Intelektual. Penjajahan kolonial Belanda secara tidak langsung membentuk elite ini dengan mendirikan sekolah sekolah yang dengan gaya barat hanya saja masih dinikmati oleh kalangan atas. Perubahan pandangan mengenai elite yang sebelumnya memandang dari pangkat sosial kemudian berubah berdasarkan tingkat pendidikannya. Pemuda yang telah mengenyam pendidikan kemudian mengenal ideologi politik modern sehingga memicu keinginan untuk melawan kolonialisme. Pendidikan modern inilah memunculkan elite pertama di Indonesia seperti Soekarno, Hatta dan Sjahrir yang menjadi motor penggerak melawan kolonialisme.
- b. Elite Militer. Penjajahan yang melanda Indonesia juga memunculkan semangat baru dikalangan remaja untuk membela bangsanya, tidak seperti para elite intelektual pemuda dengan tingkat sosial rendah berjuang dengan kekuatan fisik mereka untuk melawan penjajahan dengan masuk

menjadi anggota angkatan darat. Kekuatan angkatan darat semakin kuat setelah Soeharto menjabat menjadi Bupati hampir diseluruh lini birokrasi baik dipusat maupun daerah berasal dari kalangan militer.

- c. Elite Aktivistis. Elite ini muncul dari organisasi mahasiswa yang berada kampus dan berlanjut penyaluran aktivisme yang mereka miliki sampai kepada LSM, ornop, ormas keagamaan, dan partai politik. Para mantan aktivis inilah yang menjadi penggerak partai dan aktor politik yang dominan di Indonesia. Setelah kejatuhan Bupati Soeharto kemudian menjadi awal pergantian ruling elite baru yang didominasi oleh mantan aktivis dengan menduduki kursi parlemen hingga saat ini.
- d. Elite Pengusaha. Elite pengusaha yang digambarkan oleh Anies mulai nampak sejak era pasca runtuhnya orde baru dengan banyaknya anggota DPR RI terpilih dari kalangan pengusaha. Pada pemilihan anggota legislatif periode 2014-2019 sendiri terdapat 63 % anggota DPR (Hasudungan, 2017). Selain itu, melihat yang sudah muncul sejak pilpres 2014 dan 2019 didominasi dari latar belakang pengusaha diantaranya Aburizal Bakrie, Prabowo dan Jokowi, Yusuf Kalla, Bupati, Hari Tanoe, dan Sandiaga Uno.

Teori elite yang telah dijelaskan diatas menggambarkan elite secara umum, namun elite yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah elite pada ranah lokal. Menurut Schoorl (1980 : 67) elite lokal adalah elite yang menempati kedudukan puncak di dalam struktur-struktur sosial di tingkat lokal. Ini sekaligus untuk membedakannya dengan definisi elite nasional yang bergerak di tingkat pusat

atau tingkat nasional. Dari definisi singkat ini menjadi jelas membuat kita dapat memetakan apa yang dimaksud dengan elite lokal itu sendiri. Yang dimaksud elite lokal disini adalah elite yang menempati kedudukan puncak di dalam struktur sosial baik di bidang politik ekonomi, hukum budaya, dan sebagainya.

Nurhasim (2013 : 13) mengklasifikasikan elite lokal dan membaginya menjadi dua ketegori utama yaitu sebagai berikut :

- a. Elite politik lokal adalah orang yang mempunyai jabatan baik legislatif maupun eksekutif setelah memenangkan pemilihan secara demokratis ditingkat lokal dan menjalankan tugas dan tanggung jawabnya melalui kebijakan politik. Elite politik lokal misalnya adalah Gubernur, Bupati/ Walikota dan anggota DPRD.
- b. Elite non politik lokal adalah seorang yang mempunyai jabatan strategis dan memiliki pengaruh sehingga bisa memerintah orang lain didalam lingkungan masyarakat. Elite non politik lokal misalnya elite agama (Kyai, Ulama / Pimpinan lembaga keagamaan di daerah tersebut), elite ekonomi, elite organisasi masyarakat, dan lain sebagainya.

Elite memiliki pengaruh yang begitu besar dalam kehidupan sosial maupun politik masyarakat walaupun kehadiran elite hanya sebagai minoritas bila dibandingkan dengan kalangan non elite (massa). Dinamika elite yang terjadi dalam masyarakat senantiasa mempengaruhi perkembangan masyarakat tersebut. Untuk fokus dalam penelitian ini yang menjadi elite sebagai fokus utama penelitian ini adalah elite lokal yang masuk dalam kategori elite non politik lokal yaitu *parabela* yang menjadi tokoh adat yang memimpin dalam wilayah adat di desa desa.

2.2.3 Peran

Konsep peranan terjadi ketika terdapat kedudukan, maka peranan berasal dari sudut pandang dari kedudukan atau status. Artinya bahwa ketika seseorang yang memiliki status atau kedudukan dimasyarakat melaksanakan tugas dan kewajiban yang melekat pada kedudukannya maka orang tersebut sudah melaksanakan perannya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia peran diartikan sebagai pemain. Pemain bisa diartikan sebagai orang yang memegang kendali dan memiliki kekuasaan dalam bertindak. Pendapat lainnya mengenai peran dikemukakan oleh Biddle dan Thomas dalam Sarwono (2013:224), mengatakan bahwa peran adalah serangkaian rumusan yang membatasi perilaku-perilaku yang diharapkan dari pemegang kedudukan tertentu. Hal tersebut sama dengan yang diungkapkan oleh Mahmud (2012 :109), yang mengatakan bahwa peran merupakan sebuah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki suatu status tertentu.

Dalam peranan bisa memiliki bermacam macam jenisnya, misalnya seorang kepala Daerah memiliki peranan dalam hal kebijakan. Dalam kaitannya dengan politik pula orang-orang yang terlibat atau menjalankan tugas partai yang diembannya maka termasuk peranan dalam hal ini adalah peranan politik. Bahkan menurut Mas'ood (2013 :38), apabila seseorang memiliki kedudukan pada posisi tertentu diharapkan atau diduga untuk berperilaku tertentu pula. Maka harapan inilah yang membentuk peranan. Peran memiliki sifat yang dinamis dalam sebuah kedudukan seseorang, peranan bisa dalam bentuk apapun bagi seseorang dengan kedudukan dimasyarakat. Dalam penelitian ini yang menjadi fokus dari peranan adalah perilaku seseorang yang memiliki status dan kedudukan dimasyarakat. Konsep lain yang sesuai yang membahas tentang pengertian dari peran dikemukakan

oleh Soekanto (2012 : 28) yaitu, peran adalah aspek dinamis dari sebuah kedudukan atau status seseorang. Apabila seseorang menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan.

Dari beberapa konsep mengenai teori peran diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa peran adalah perilaku seseorang atau tindakan yang dilakukan seseorang tersebut yang memiliki tanggung jawab atau tugasnya untuk kepentingan orang banyak dan menjadi tindakan yang diharapkan oleh orang lain yang menerima tindakan tersebut. Hal ini berarti peranan merupakan hal yang bisa memberikan dampak dan dampak itu merupakan harapan atau keinginan dari yang menerimanya.

2.2.3 Pemilukada dan Dinamika Politik Lokal

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) berawal dari tuntutan masyarakat akan demokrasi yang dianggap sebagai jalan untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan bisa bertanggung jawab kepada rakyatnya. Pilkada yang awalnya dipilih melalui anggota legislatif dianggap tidak dapat merepresentasikan pemimpin yang menjadi keinginan masyarakat bahkan dianggap hanya sebagai pemimpin yang hanya bersal dari dukungan orang-orang tertentu yang memiliki kepentingan pribadi. Kemudian terjadi perkembangan politik lokal yang memicu untuk melaksanakan pilkada secara langsung sebagai dasar meletakkan sistem politik dan memberikan kedaulatan kepada rakyat ditingkat lokal untuk menjalankan demokrasi sebagaimana yang dicita-citakan saat reformasi.

Bukan tanpa alasan, pilkada pada tingkat lokal diharapkan bisa memberikan perubahan dalam kehidupan berpolitik masyarakat ditingkat lokal. Hal lainnya yang

diharapkan adalah agar dalam melaksanakan demokrasi bisa membawa nilai yang menjadi identitas masyarakat lokal tersebut baik dari segi politik, sosio-ekonomi, serta budaya masyarakat karena Indonesia adalah negara yang memiliki keragaman budaya serta identitas dan karakter masyarakat yang berbeda-beda pula. Untuk menjelaskan konsep mengenai pemilu maka kita harus mengetahui lebih dahulu tentang konsep pemilu.

Ciri negara yang menganut negara yang menerapkan sistem demokrasi yakni adanya penyelenggaraan pemilu. Pemilu merupakan alat yang digunakan untuk memilih pemimpinnya untuk menjalankan pemerintahan. Maka bagi rakyat pemilu menjadi sarana yang sangat penting terlebih lagi dalam bernegara. Menurut Budiardjo (2008: 461) hasil pemilihan umum yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap mencerminkan dengan cukup akurat atas aspirasi dan partisipasi masyarakat. Keterbukaan dan kebebasan berpendapat inilah menjadi kunci atas suksesnya pemilihan umum tersebut, bukan hasil yang diperoleh dari tekanan oleh pihak yang berkuasa yang bisa membatasi keinginan masyarakat untuk menentukan pilihannya.

Pendapat lainnya yang dikemukakan oleh Warren dan Sudharto (dalam Surbakti, 2012: 15), Warren berpendapat pemilu adalah kesempatan bagi para warga negara untuk memilih pejabat pemerintah dan memutuskan apakah yang mereka inginkan untuk dikerjakan oleh pemerintah. Dan dalam membuat keputusan itu para warga negara menentukan apakah sebenarnya yang mereka inginkan untuk dimiliki. Sedangkan menurut Sudiharto, pemilu adalah sarana demokrasi yang

penting dan merupakan perwujudan yang nyata untuk keikutsertaan rakyat dalam kehidupan kenegaraan.

Dari beberapa konsep pemilu menurut para ahli yang telah dibahas sebelumnya dapat diambil kesimpulan bahwa pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemilu yang bebas diartikan sebagai dalam menentukan pilihan tidak mendapatkan pengaruh dari manapun juga. Kualitas penyelenggaraan pemilihan terlihat dari seberapa besar tingkat kebebasan dalam pelaksanaan pemilu tersebut. Dan juga dapat dilihat dari seberapa tinggi tingkat partisipasi masyarakat dalam mengikuti penyelenggaraan pemilu, tingginya partisipasi inilah menandakan proses berdemokrasi yang baik.

Pemilihan yang dijelaskan sebelumnya merupakan konsep dari pemilu yang secara umum. Hanya berbeda sedikit dengan pemilihan umum dalam pengertian Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) adalah pemilu yang diselenggarakan di daerah. Pemilukada menjadi instrument demokrasi pada tingkat lokal dan dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi di daerah. Maka dengan pemilu inilah maka rakyat sebagai pemegang kendali, rakyatlah yang menentukan kemajuan sebuah pemerintahan daerah bahkan dalam lingkup negara sebagaimana moto demokrasi bahwa kekuasaan berada ditangan rakyat. “Melalui Pilkada, rakyat dapat memilih siapa yang menjadi pemimpin dan wakilnya dalam proses penyaluran aspirasi, yang selanjutnya menentukan arah masa depan sebuah Negara.” (Yusdianto, 2010: 44)

Jika dilihat berdasarkan peraturan perundang undangan di Indonesia Pemilihan Kepala Daerah dilandasi dengan berlakunya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 56 ayat (1) tertulis bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Asas umum, bebas, rahasia dan adil mengarah kepada asas- asas pemilihan umum. Lebih lanjut Pemilukada dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan pengangkatan, dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Setelah menjelaskan tentang pemilukada maka berikutnya akan dibahas mengenai konsep dari politik lokal. Bukan tentang politik lokalnya saja namun dinamika yang terjadi pada ranah lokal dalam kaitannya dengan pemilihan kepala daerah. Dinamika menurut Soelaiman Joesoyf (2014: 43) adalah perubahan yang terjadi baik secara besar maupun kecil atau perubahan yang terjadi secara cepat atau lambat, artinya dinamika merupakan kenyataan yang berhubungan dengan perubahan keadaan. Terjadinya pergerakan, adanya kekuatan yang besar, dan juga tenaga yang dikeluarkan agar dapat berkembang serta dapat menyesuaikan diri secara terhadap keadaan bisa juga dikatakan sebagai dinamika. Arti lain dari dinamika yakni interaksi dan keterkaitan yang terjadi antara anggota kelompok dengan kelompok secara keseluruhan (Joesoef, 2014: 43). Maka jika dikaitkan dengan politik lokal dinamika yang terjadi adalah ketika kelompok-kelompok yang

bertarung dalam pilkada menggunakan semua potensi dan sumber dayanya untuk memenangkan pemilihan.

Elite-elite politik lokal kemudian memanfaatkan modal modal sosial dari masyarakat di daerah untuk memenangi pilkada. Sehingga hal-hal yang berkaitan dengan etnis, suku, agama, ras dll tidak bisa terhindarkan dari persoalan-persoalan politik. Persoalannya kemudian dengan pemanfaatan modal sosial inilah sehingga muncul politik identitas, mereka dijadikan sebagai tameng-tameng politik bagi orang-orang yang bertarung dalam pilkada. Tidak heran elite-elite lokal seperti tokoh adat, tokoh agama, kepala suku menjadi tameng untuk memuluskan kemenangan elite politik dalam pilkada (Nuhasim, 2013 : 32). Menggunakan elite non politik lokal sebagai tameng dalam pilkada yang merupakan hal rasional bagi elite politik. Hal ini tidak jarang sebelum dan sesudah pemilihan kepala daerah berlangsung kemudian terjadi konflik di masyarakat, yang dimainkan oleh elite-elite politik yang tidak menerima kekalahan ataupun yang ingin mencari keadilan dalam proses pemilu (Nurhasim, 2013 : 33).

Konflik-konflik yang terjadi pada proses pemilihan kepala daerah sering terjadi baik itu dalam skala besar maupun yang berskala kecil. Yang kemudian dirugikan adalah masyarakat, lingkungan yang tidak aman. Apabila merujuk pada konsep pemilihan umum yang seharusnya hal ini menjadikan kualitas dari proses demokrasi menjadi tidak maksimal. Ditambah lagi dengan calon kepala daerah dan elite pendukung baik dari partai politik maupun kelompok masyarakat yang terus memainkan manajemen konflik yang tidak mendidik berakibat pada penderitaan rakyat. Maka dinamika-dinamika seperti ini kemudian perlu diperhatikan oleh

masyarakat, kepala suku, tokoh agama sehingga mereka sebagai elite yang bisa menjadi penengah ketika terjadinya konflik dimasyarakat dapat berperan dengan maksimal. Dan juga yang paling penting adalah adanya Pendidikan politik yang memadai agar masyarakat lebih melek politik dan terhindar dari manajemen konflik dan juga politik hitam yang selalu terjadi.

2.2.4 Modal Sosial

Menurut Bourdieu (1986 : 50) terdapat tiga modal yaitu, modal budaya, modal ekonomi, dan modal sosial. Bourdieu mengemukakan bahwa modal sosial yang dimaksud yaitu sumber daya yang potensial serta aktual dimiliki seseorang yang berasal dari jaringan sosial yang terlembagakan serta secara terus menerus dalam bentuk pengakuan dan perkenalan timbal balik memberikan anggotanya dalam bentuk dukungan secara menyeluruh. Lebih lanjut Bourdieu mengatakan modal sosial bisa menjadi sesuatu yang berhubungan dengan bidang lain seperti dibidang ekonomi dan budaya, bahkan modal sosial yang ada dalam institusi dan kekayaan sumber daya alam.

Pengertian lain mengenai modal sosial dikemukakan oleh Putnam (1993: 89) yakni modal sosial adalah hubungan saling percaya antara masyarakat dengan pemimpinnya. Modal sosial kemudian dapat dilihat dari sisi bagaimana melibatkan jaringan, kepercayaan dan norma sosial untuk mendorong terjadinya kolaborasi sosial dalam kepentingan bersama. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Syahyuti (2008: 18) bahwa modal sosial tergantung pada tiga aspek yaitu kepercayaan dari lingkungan sosial dan perluasan aktual dari kewajiban yang sudah dipenuhi, jaringan informasi yang sangat penting sebagai basis tindakan dan norma

serta sanksi yang efektif dalam kelompok atau komunitas yang dapat mendukung individu untuk memperoleh prestasi.

Sedangkan konsep modal sosial yang dikemukakan oleh Fukuyama bahwa kepercayaan dari masyarakat atau bagian tertentu yang membuat terciptanya kapabilitas. Modal sosial memiliki perbedaan dengan modal manusia (*human capital*), modal sosial bisa dilembagakan dalam bentuk kelompok sosial yang paling dasar dan paling kecil sekalipun. Modal sosial bisa dibentuk dalam lingkungan dengan mekanisme kultural seperti sejarah, agama dan tradisi (Fukuyama, 2002: 89).

Untuk dapat ikut serta dalam perhelatan pemilihan dalam konteks ini adalah pemilihan kepala daerah masing-masing calon yang bertarung harus memiliki modal. Modal yang dimaksud disini adalah modal politik, modal ekonomi, modal sosial dan modal budaya. Untuk memperbesar kemungkinan mendapatkan kemenangan tentunya calon kepala daerah harus memiliki lebih dari satu modal. Jika hanya memiliki satu atau dua saja tentunya akan sulit untuk bisa memenangkan pilkada, karena kemenangan dalam pilkada memiliki faktor yang kompleks dan bukan karena satu dua faktor saja.

Modal sosial sebagai serangkaian nilai atau norma informal yang dimiliki bersama diantara anggota suatu kelompok yang memungkinkan terjalinnya kerjasama diantara mereka. Masyarakat dengan kepercayaan yang tinggi dijamin sukses dalam menjalankan visi dan misinya, sebaliknya sikap saling curiga suka menaruh kecewa kepada orang lain dan selalu cemburu satu sama lain yang menandakan rendahnya tingkat kepercayaan atau tidak adanya rasa percaya.

Sehingga ketika seorang calon kepala daerah yang terpilih tidak mendapatkan kepercayaan penuh maka akan kesulitan untuk melaksanakan misi politik sehari-harinya (Fukuyaman, 2002 :86).

Ada tiga komponen modal sosial menurut Putnam (dalam lin,2001:12) yang dikaitkan dengan kapital sosial dengan lembaga sosial yaitu jaringan sosial, norma-norma, dan kepercayaan sosial.

a. Jaringan Sosial

Jaringan-jaringan kerjasama antar manusia terwujud dari infrastruktur dinamis dari modal sosial yang memfasilitasi terjadinya komunikasi dan interaksi yang memungkinkan tumbuhnya kepercayaan dan memperkuat kerjasama. Masyarakat yang sehat akan memiliki jaringan sosial yang kokoh pula yang dapat memperkuat perasaan kerjasama anggotanya dan mendapat manfaat dari partisipasinya.

b. Norma-norma

Norma-norma terdiri dari pemahaman, nilai, harapan dan tujuan yang diyakini dan dijalankan bersama oleh sekelompok orang. Norma-norma dapat terbentuk dari agama, panduan moral, maupun standar-standar sekuler seperti kode etik yang berupa pra-kondisi ataupun produk dari kepercayaan sosial. Norma sosial yang ada dalam masyarakat secara sengaja diciptakan untuk mengatur perilaku masyarakatnya. Norma merupakan aturan yang tidak tertulis yang dibangun kemudian tumbuh berkembang dalam masyarakat dan selalu dipertahankan agar memperkuat lingkungan masyarakat tersebut. Ketika seseorang dalam lingkungan

masyarakat tersebut mengikuti norma yang berlaku maka dia akan diuntungkan demikian sebaliknya masyarakat yang melanggar norma akan mendapat kerugian.

c. Kepercayaan

Kepercayaan merupakan kejujuran atau kesediaan untuk membantu segala hal yang bisa dibagikan dalam lingkup kelompok masyarakat yang terbatas bukan dengan masyarakat yang lainnya atau masih dalam lingkungan masyarakat yang sama namun sangat terbatas. Ketika anggota kelompok mengharapkan untuk bersikap jujur dan terpercaya maka akan memunculkan sikap saling mempercayai antara satu dengan lainnya.

2.3 Definisi Konseptual

Konsep adalah sebuah generalisasi dari sekelompok data abstrak yang secara nyata dapat memberikan arah dan ruang lingkup pada variabel penelitian, agar mudah dipahami. Berikut adalah beberapa definisi konseptual dari penelitian ini.

- a. Modal Sosial. Modal Sosial yang di maksud di sini adalah sumber-sumber kekuatan berupa jaringan sumber daya aktual dan potensial yang dimiliki seseorang berasal dari jaringan sosial yang terlembagakan serta berlangsung terus menerus dalam bentuk pengakuan dan perkenalan timbal balik. modal sosial sebagai sesuatu yang berhubungan satu dengan yang lain, baik ekonomi, budaya, maupun bentuk bentuk *social capital* (modal sosial).
- b. Tokoh adat Parabela, Kekuatan adat yang memiliki kekuatan yang cukup besar dan menjadikan persaingan di antar elite pada tingkat lokal menjadi

lebih beragam. kekuatan adat diranah lokal menggiurkan bagi pasangan calon yang bertarung dalam ranah politik agar memperoleh suara bahkan di pelosok yang belum pernah di jangkauanya.

- c. Pemilukada. Proses pemilihan di daerah untuk memilih pemimpin daerah, baik pada tingkatan provinsi, kabupaten, maupun kota. Pelaksanaannya yang di sempurnakan dalam UU No 32 Tahun 2014, dan di sempurnakan kembali melalui UU No 12 Tahun 2008.

2.4 Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan informasi ilmiah yang sangat membantu peneliti lain yang ingin melakukan penelitian dengan menggunakan variabel yang sama. Karena berdasarkan informasi itu, ia akan mengetahui bagaimana caranya melakukan pengukuran terhadap variabel yang dibangun berdasarkan konsep yang sama. Dengan demikian ia dapat menentukan apakah tetap menggunakan prosedur pengukuran yang sama atau diperlukan pengukuran yang baru.

Table 2. Variabel dan Indikator Modal Sosial Parabela

Variabel	Indikator	Parameter
Modal Sosial Parabela	Kepercayaan	Tingkat kepercayaan masyarakat kepada parabela
	Norma	Aturan aturan adat yang berlaku dimasyarakat
	Jaringan	Hubungan antara parabela dengan masyarakat, elite lokal, dan elite pemerintah.